



RENCANA KERJA 2025

DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN



Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Website : <https://dinsos.karimunkab.go.id> / Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id
Telepon/Faksimile 0777-7360422 / 7360423



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.
- (4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini, merupakan panduan dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk periode satu tahun kedepan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Renja ini mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021—2026 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dan untuk meninjau kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (2024).

Diharapkan semua bidang teknis di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan *stakeholders* lainnya dengan adanya rencana kerja ini akan tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menciptakan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karimun



Dr. Sularno, S.Sos., M.Si.
Kepala Utama Muda
NIP. 197010261992011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun.....	25
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .	28
3.3. Program dan Kegiatan.....	29
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB 5 PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023	7
Tabel 2.2 Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021.....	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023	22
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023	22
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025	29
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang menjadi dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Selain itu, Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun mengacu pada Tema Pembangunan Kabupaten karimun Tahun 2025 *“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien”* serta mengacu pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025 *“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif”*.

Penyusunan RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini sebagai bahan acuan dalam pembangunan khususnya upaya penyelenggaraan sosial selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan dimensi waktu, sumberdaya dan potensi yang dimiliki, isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat

memberikan dampak yang signifikan untuk terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 33);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan beserta rencana kerja dan anggaran.

Tujuan penyusunan RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA PD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

- BAB 2** **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- BAB 3** **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB 4** **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**, berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
- BAB 5** **Penutup**

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Karimun melaksanakan 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Tahun 2023

No.	Nama Program	No.	Nama Kegiatan	No.	Nama Sub Kegiatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.	Penyediaan Permakanan
				2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				3.	Pemberian Layanan Rujukan
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	4.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				5.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3.	Program Penanganan Bencana	3.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	6.	Penyediaan Makanan
				7.	Penyediaan Sandang
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				10.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				12.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Nama Program	No.	Nama Kegiatan	No.	Nama Sub Kegiatan
				15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				16.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
				18.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
		7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023 dicapai dengan berbagai upaya dan strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.643.280.770,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.847.646.381,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau 82,86%. Uraian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Capaian kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4.64%	5.13%	149.999.681	68.232.116	45,49
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	165 Org	167 Org	149.999.681	68.232.116	45,49
	1. <i>Penyediaan Permakanan</i>	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan	80 Org	80 Org	39.988.858	25.973.822	64,95
	2. <i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 Org	80 Org	60.011.029	30.284.900	50,47
	3. <i>Pemberian Layanan Rujukan</i>	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Org	7 Org	49.999.794	11.973.394	23,95
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	46.84%	44.55%	90.069.038	51.677.513	57,38
	2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	94.704 jiwa	93.209 jiwa	90.069.038	51.677.513	57,38

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	4. <i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	1.000 Org	889 Org	19.999.038	2.015.513	10,08
	5. <i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6.913 KPM 9.269 KPM	6.077 KPM 8.704 KPM	70.070.000	49.662.000	70,87
3.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	351.782.340	237.764.920	67,59
	3. <i>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	800 Org	195 Org	351.782.340	237.764.920	67,59
	6. <i>Penyediaan Makanan</i>	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Org	195 Org	245.634.854	178.164.920	72,53
	7. <i>Penyediaan Sandang</i>	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Org	10 Org	106.147.486	59.600.000	56,15
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	79,50	81,79	4.051.433.711	3.489.971.832	86,14
	4. <i>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen	5 Dok	5 Dok	89.849.601	51.495.500	57,31

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	8. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	42.809.976	23.123.000	54,01
	9. <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2 Lap	19.999.625	17.659.500	88,30
	10. <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	27.040.000	10.713.000	39,62
	5. <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan	1 Lap	1 Lap	3.263.057.417	2.933.865.815	89,91
	11. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	328 Org Bln	328 Org Bln	3.186.449.417	2.872.125.815	90,14
	12. <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dok	1 Dok	76.608.000	61.740.000	80,59
	6. <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan	1 Lap	1 Lap	196.541.250	107.114.282	54,50
	13. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	548.783	200.000	36,44
	14. <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.661.417	9.096.000	58,08
	15. <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.835.847	988.300	53,83
	16. <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.385.526	7.123.000	62,56
	17. <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	9.725.000	6.330.000	65,09

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kinerja Keuangan		
		Indikator	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
	18. <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	33 Lap	157.384.677	83.376.982	52,98
	7. <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah laporan	1 Lap	1 Lap	448.021.000	391.742.235	87,44
	19. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	87.696.000	48.692.235	55,52
	20. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	360.325.000	343.050.000	95,21
	8. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Laporan Pemeliharaan	1 Lap	1 Lap	53.964.443	5.754.000	10,66
	21. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	33.882.476	4.000.000	11,81
	22. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	18.878.850	1.754.000	9,29
	23. <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	593.117	0	0
	24. <i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	610.000	0	0
J U M L A H					4.643.284.770	3.847.646.381	82,86

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan pencapaian Renstra 2021 – 2026 dapat terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	4,00				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial			Nilai AKIP	76,50				
		1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	83	81.79	82	82	98.80
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	11 Dokumen	4 Dokumen	15 Dokumen	40.54
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	5 dokumen	45.45
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	53.33
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	20
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	5 laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renta PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renta PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renta PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.750 orang bulan	594 orang bulan	336 orang bulan	930 orang bulan	53.14
		1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	60
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	3 Paket	60
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	4 Paket	12 Paket	60
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	6 Paket	60
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	6 Paket	60
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	60
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	80 Laporan	25 Laporan	105 Laporan	77.78
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	5 laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 paket	2 Paket	2 paket	4 paket	26.67
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	4 Unit	1 Unit	5 unit	16.30
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	7 unit	7 unit	14 unit	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	5 laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	-	2 Laporan	40
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	60
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	5 laporan	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	60
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	3 unit	7 unit	10 unit	38.85
		1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	12 unit	7 unit	19 unit	100
Meningkatkan kesejahteraan sosial				Persentase PPKS mandiri	3.03	1.72	1.93	1.93	
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS			Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	8.37 56.80	5.95 52.70	6.99 54	6.99 54	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	90 Persen 41.14 Persen	60 Persen 32.28 Persen	70 Persen 34.81 Persen	70 Persen 34.81 Persen	77.78 84.61
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan ketentuan	70 izin	10 izin	-	10 izin	14.29
		1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi	9 Lembaga 65 Orang	6 Lembaga 51 Orang	7 Lembaga 55 Orang	7 Lembaga 55 Orang	77.78 84.62
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	40 orang	-	40 orang	20
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	-	14 orang	14 orang	23.33
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 lembaga	7 lembaga	1 lembaga	8 lembaga	32
		1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100 Persen	-	-	-	-
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	50 orang	-	-	-	-
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	-	-	-	-
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7.15 Persen	5.13 Persen	6.93 Persen	6.93 Persen	96,92
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	1.375 orang	332 orang	422 orang	754 orang	54.84
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	435 orang	80 orang	-	80 orang	18.39
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	445 orang	50 orang	-	50 orang	11.24

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	295 orang	50 orang	45 orang	95 orang	32.20
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	12 orang	-	12 orang	24
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 orang	130 orang	135 orang	265 orang	100
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	10 orang	7 orang	17 orang	34
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	275 orang	-	52 orang	52 orang	18.91
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 orang	-	26 orang	26 orang	100
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	-	26 orang	26 orang	10.4
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50.68 Persen	44.55 Persen	49.97 Persen	49.97 Persen	98.60
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	100.000 orang	89.904 orang	86.000 orang	86.000 orang	86

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renta PD Tahun Lalu (2023)	Target Program dan Kegiatan (Renta PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program s.d. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renta PD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9/6*100
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	50.000 Orang	11.692 orang	1.000 orang	12.692 orang	25.39
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.850 KPM	8.704 KPM	1.800 KPM	9.704 KPM	100
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	4.000 Orang	936 Orang	300 Orang	1.236 Orang	30.90
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000 Orang	936 Orang	300 Orang	1.236 Orang	30.90
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	440 Orang	100 orang	-	100 orang	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan sosial.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024 dilaksanakan berdasar indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dengan memasukkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Sosial yang merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tahun 2023, Dinas Sosial melaksanakan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun s.d. Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM /IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					CAPAIAN KINERJA		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		7,02	6,11	6,81	7,59	8,37	6,72	5,95	
2	Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos		50,52	52,50	54	55,50	56,80	51,11	52,70	
3	Nilai AKIP		76,30	76,30	76,40	76,40	76,50	76,21	76,44	
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		4,43	5,59	6,87	8,28	9,84	3,38	5,13	
5	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100	100	100	100	100	100	100	

2.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target Tahun 2023 dengan capaian hingga Tahun 2023. Dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	6,11 %
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	52,50%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,45

2.2.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	6,11 %	5,95 %	97,38
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	52,50%	52,70 %	100,38
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,45	76,44	99,99

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 diukur melalui 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah 99,25%. Capaian indikator kinerja pada setiap sasaran sudah sangat baik namun terdapat 2 (dua) indikator yang targetnya tidak tercapai. Dinas Sosial akan terus melakukan perbaikan kinerjanya dan melaksanakan evaluasi atas setiap capaian sasaran strategisnya sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja Tahun 2023 ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan Dinas Sosial Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, Dinas Sosial Kabupaten Karimun merencanakan program dan kegiatan Tahun 2025 yang lebih difokuskan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan.
2. Peningkatan dalam Pemenuhan kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Capaian kinerja Tahun sebelumnya yang berkaitan dengan Pemenuhan SPM bidang sosial belum optimal, sehingga perlu adanya peningkatan dengan merencanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana;
3. Mendukung Pemerintah daerah dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting dengan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Kabupaten/Kota;
4. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

5. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan sosial untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah dan masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berangkat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang sangat kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan sosial tidak hanya menyangkut variabel masalah sosial yang sangat luas (mulai dari kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterasingan, ketunaan sosial, efek kebencanaan baik alam maupun bencana sosial, dan penyimpangan perilaku masyarakat), namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program kesejahteraan sosial agar lebih menyentuh akar permasalahan mendasar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kabupaten Karimun.

Dari sisi dinamisasi persoalan kesejahteraan sosial memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, terutama program prioritas OPD terkait yang dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan sosial yang dapat muncul di kemudian hari.

Secara umum permasalahan pembangunan terkait persoalan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun dengan isu-isu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan;
2. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Masih terbatasnya ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan *up to date*, sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
4. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang bertanggung;
6. Dukungan sarana dan prasarana dinas yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karimun

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Karimun yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM dan pembahasan di Forum OPD. Pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari masyarakat.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”, dengan pembangunan nasional yang diarahkan pada 8 (delapan) prioritas nasional yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. elanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. *Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;*
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial;
2. Pembinaan lembaga dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar SPM bidang sosial;
4. Meningkatkan penanganan dan pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran pada RENJA PD pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas utama meningkatkan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.

Strategi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas utama meningkatkan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, secara rinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS.
3. Meningkatkan pemberdayaan PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas lembaga sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah sosial.
4. Pemantapan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Arah kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prioritas utama meningkatkan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, secara rinci :

1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan berbasis masyarakat, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta reunifikasi.
2. Memfasilitasi dan atau memberikan asistensi sosial dalam bentuk bantuan barang serta memfasilitasi asistensi sosial berbasis peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat PKH, BPNT dan PBI JKN.
3. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Fakir Miskin.
4. Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program.

5. Peningkatan kapasitas PSKS dilakukan dengan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial, memberikan pelatihan teknis bagi TKSK, PSM, Tagana dalam penanganan masalah sosial.
6. Akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan Kessos.
7. Peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Peningkatan koordinasi dan peran serta kelembagaan sosial lainnya.

Uraian tujuan dan sasaran strategis pada penyusunan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tahun 2025 yang akan datang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Pada Renja Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	7,82 %
			Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	54,50 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,50

3.3. Program dan Kegiatan

Bedasarkan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 8.159.147.827,-. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2025 akan dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan meliputi :

SASARAN STRATEGIS 1 :

“Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”

1. Program Rehabilitasi Sosial

Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 1.139.999.700,-

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

2. Program Penanganan Bencana

Sasaran : Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 811.000.800,-

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sasaran : Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 725.000.000,-

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pemberdayaan Sosial

Sasaran : Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial PSKS.

Pagu Indikatif : Rp. 200.000.000,-

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

SASARAN STRATEGIS 2 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial”

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran : Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Sosial yang optimal.

Pagu Indikatif : Rp. 5.283.147.327,-

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun namun juga melalui sumber pendanaan lainnya APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBN.

Uraian rumusan program dan kegiatan pa5a Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2024 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase PPKS mandiri		2,59			2,85	
				1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos		7,82 54,50			8,37 55	
		1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.159.147.827			7.577.545.000
		1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.159.147.827			7,519,256,000
		1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		7,85 Persen	1,139,999,700		8,02 Persen	998,000,000
		1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar		330 Orang	1,139,999,700		370 orang	812,000,000
		1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	100 Orang	160,000,000	PAD	90 orang	120,000,000
		1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	100 Orang	160,000,000	PAD	90 orang g	143,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	65 orang	160,000,000	PAD	60 orang	164,000,000
		1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	10 orang	120,000,000	PAD	5 orang	50,000,000
		1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	50 orang	100,000,000	PAD	50 orang	70,000,000
		1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	50 orang	100,000,000	PAD	20 orang	50,000,000
		1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	10,000,000	PAD	5 orang	10,000,000
		1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	10,000,000	PAD	5 orang	10,000,000
		1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	20 orang	50,000,000	PAD	10 orang	10,000,000
		1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	50,000,000	PAD	5 orang	5,000,000
		1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 orang	20,000,000	PAD	5 orang	35,000,000
		1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	7 orang	199,999,700	PAD	5 orang	140,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		45,81 Persen	725.000.000		47,16 Persen	650,000,000
		1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS		84.000 orang	725.000.000		86.000 orang	650,000,000
		1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1.000 orang	210.000.000	PAD	1.000 orang	135,000,000
		1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	15 keluarga	115.000.000	PAD	10 keluarga	115.000.000
		1.6.5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	8.668 KPM	275.000.000	PAD	7.850 KPM	300,000,000
		1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	30 orang	125.000.000	PAD	25 orang	100,000,000
		1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100 Persen	811.000.800		100 Persen	760,000,000
		1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar		400 orang	811.000.800		350 Orang	760,000,000
		1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	400 orang	492.461.000	PAD	350 orang	400,000,000
		1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	90 orang	161.088.000	PAD	70 orang	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	1.6.6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	1 unit	75.219.000	PAD	1 unit	25.000.000
		1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	20 orang	16.878.000	PAD	80 orang	70.000.000
		1.6.6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karimun, semua kecamatan, semua kelurahan	40 orang	65.354.800	PAD	30 orang	35.000.000
		1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi		70 Persen	200.000.000		80 Persen	453.000.000
				Persentase PSKS individu yang tersertifikasi		36,08 Persen			36,61 Persen	
		1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi		7 lembaga	200.000.000		8 lembaga	453.000.000
				Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi		57 orang			61 orang	
		1.6.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 lembaga	200.000.000	PAD	3 lembaga	115,000,000
				Indeks Pelayanan Publik		3,55			3,58	
				Nilai AKIP		76,50			76,50	
		1.6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM		82,50	5.283.147.327		83	4.681.545.000
		1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		5 dokumen	34.999.700		5 dokumen	140,000,000
		1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 dokumen	20,000,000	PAD	1 dokumen	60,000,000
		1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	2 laporan	9.999.700	PAD	2 laporan	50,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 laporan	5,000,000	PAD	1 laporan	50,000,000
		1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan		1 laporan	4.378.839.127		1 laporan	3.117.000.000
		1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	420 orang bulan	4.294.671.127	DAU	420 orang bulan	2.999.000.000
		1.6.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 dokumen	84.168.000	PAD	1 dokumen	118,000,000
		1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan		1 Laporan	257,200,500		1 Laporan	333,545,000
		1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Paket	3.530,000	PAD	1 Paket	3,000,000
		1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	4 Paket	14.570,500	PAD	4 Paket	23,000,000
		1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	2 Paket	3,116,000	PAD	2 Paket	9,000,000
		1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	2 Paket	14,454,000	PAD	2 Paket	23,000,000
		1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Dokumen	5,000,000	PAD	1 Dokumen	35,000,000
		1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	25 Laporan	216,480,000	PAD	25 Laporan	190,545,000
		1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan		1 Laporan	48.624.000		1 Laporan	70,000,000
		1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	4 unit	48.624.000	PAD	5 unit	70,000,000
		1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan		1 Laporan	522,965,000		1 Laporan	550,000,000
		1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Laporan	13.990.000	PAD	1 Laporan	85,000,000
		1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 Laporan	508,975,000	PAD	1 Laporan	450,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan		1 Laporan	40,519,000		1 Laporan	62,000,000
		1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	1 unit	22.069.000	PAD	1 unit	30,000,000
		1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	3 unit	13.460.000	PAD	3 unit	22,000,000
		1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karimun, Kec. Meral, Kel. Sei. Raya	5 unit	4,990,000	PAD	3 unit	10,000,000

BAB 5

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun perlu keterpaduan dan sinkronisasi baik dalam kegiatan maupun antar instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah sistematika penulisan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemabngunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Renja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Menjadikan Renja sebagai pedoman pelaksanaan kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2025.
2. Menjadikan acuan bagi Bidang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025.
4. Menyusun jadwal pelaksanaan, memperkirakan penggunaan anggaran tiap triwulan serta penggunaan sarana, prasarana dan tenaga yang akan melaksanakan rencana kerja.
5. Mempersiapkan format-format laporan pelaksanaan yang didasarkan pada target pencapaian Renstra dan target pencapaian SPM.
6. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan masalah sosial.

Tanjung Balai Karimun, 8 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Karimun



Sylarno, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197010261992011001

LAMPIRAN

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesejahteraan sosial				Persentase PPKS mandiri	2,59					8,159,147,827
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	7,82 54,50					8,159,147,827
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PPKS yang optimal		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,85 Persen	1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,85 Persen	1,139,999,700
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS yang sesuai standar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	330 Orang	1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	330 Orang	1,139,999,700
						1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	160,000,000
						1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	160,000,000
						1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	65 orang	160,000,000
						1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	120,000,000
						1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	100,000,000
						1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	100,000,000
						1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	10,000,000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	10,000,000
						1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 orang	50,000,000
						1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	50,000,000
						1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	20,000,000
						1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	199,999,700
		Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	45,81 Persen	1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	45,81 Persen	725.000.000
			Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin yang efektif	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	84.000 orang	1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	84.000 orang	725.000.000
						1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	1.000 orang	210.000.000
						1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	15 keluarga	115.000.000
						1.6.5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.668 KPM	275.000.000
						1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	125.000.000
		Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS yang optimal		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	811.000.800
			Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana yang optimal	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	400 orang	1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	400 orang	811.000.800
						1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	492.461.000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	161.088.000
						1.6.6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	75.219.000
						1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	16.878.000
						1.6.6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	65.354.800
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial PSKS		Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	70 Persen 36,08 Persen	1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	70 Persen 36,08 Persen	200.000.000
			Meningkatnya Kompetensi PSKS sesuai standar	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi	7 lembaga 57 orang	1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi	7 lembaga 57 orang	200.000.000
						1.6.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 lembaga	200.000.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	3,55					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial			Nilai AKIP	76,50					
		Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Sosial yang optimal		IKM	82,50	1.6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	82,50	5.283.147.327
			Meningkatnya Kinerja Perencanaan Dinas Sosial yang optimal	Jumlah Dokumen	5 dokumen	1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 dokumen	34.999.700
						1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	20,000,000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	9.999.700
						1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5,000,000
			Meningkatnya Kinerja Keuangan Dinas Sosial yang optimal	Jumlah laporan	1 laporan	1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 laporan	4.378.839.127
						1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 orang bulan	4.294.671.127
						1.6.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	84.168.000
			Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran yang efektif	Jumlah laporan	1 laporan	1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 Laporan	257,200,500
						1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.530,000
						1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.570,500
						1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3,116,000
						1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,454,000
						1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000
						1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	216,480,000
			Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	Jumlah Laporan	1 laporan	1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	48.624.000
						1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	48.624.000
			Terimplementasinya SOP Dinas Sosial sesuai standar pelayanan	Jumlah laporan	1 laporan	1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	522,965,000
						1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.990.000
						1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	508,975,000

Sasaran RPJMD / Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target 2025	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
									Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	Laporan pemeliharaan	1 laporan	1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	1 Laporan	40,519,000
						1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.069.000
						1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	13.460.000
						1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	4,990,000